

ABSTRAK

IDB. SANTOSA, 2017, EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PIDANA (STUDI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TERKAIT DENGAN KASUS PEMBUATAN PUPUK OPLOSAN/PALSU YANG DILAKUKAN OLEH CV. INDO AGRITAMA INDUSTRI JEPARA), TESIS, PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM PROGRAM PASCA SARJANA UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG.

Meneliti efektifitas penegakan hukum pada dasarnya membandingkan antara realitas hukum dengan ideal hukum. Pelaku tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu telah diputus pengadilan melanggar Undang-Undang RI. No.3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian Pasal 120 ayat (1) dan subsider Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 huruf a UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 60 ayat (1) huruf f UU. R.I NO. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi Daya Tanaman. Putusan Pengadilan Negeri Jepara NOMOR: 05/Pid.Sus/2015/PN. Jpa telah menjatuhkan vonis penjara dan denda kepada pelaku. Permasalahan dalam penelitian kasus pembuatan pupuk oplosan/palsu oleh CV. Indo Agritama Industri Jepara adalah bagaimanakah penegakan hukum pidana serta bagaimanakah faktor penghambat penegakan hukum pidana. Berdasarkan hasil penelitian secara yuridis sosiologis dapat disimpulkan sebagai berikut: penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan cara: (1). Tahap Formulasi, penegakan hukum diatur dalam Undang-Undang RI. No.3 Tahun 2014, UU No.8 Tahun 1999, UU. R.I NO. 12 Tahun 1992 (2). Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga pengadilan; (3). Tahap Eksekusi, yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp.8.000.000,-(delapan juta Rupiah). Faktor penghambat dari penegakan hukum pidana tersebut adalah (1). Faktor hukumnya sendiri; (2). Faktor penegak hukum. Saran dalam penelitian ini, Para penegak hukum yaitu hakim, jaksa, dan polisi harus melaksanakan perannya masing-masing dengan baik serta meningkatkan kinerja dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana pembuatan pupuk oplosan/palsu yang dilarang agar dapat terlaksananya penegakan hukum yang efektif.

Kata Kunci: Penegakan Hukum Pidana, Efektivitas Penegakan Hukum, Pupuk Oplosan/Palsu, Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana, Faktor Hukum Penegakan Hukum.

ABSTRACT

IDB. SANTOSA, 2017, EFFECTIVENESS OF CRIMINAL LAW ENFORCEMENT (STUDY ON LEGAL ENFORCEMENT RELATED TO THE CASE OF MIXED FERTILIZER/FALSE FERTILIZER THAT HAVE BEEN DONE BY CV. INDO AGRITAMA INDUSTRI JEPARA), THESIS, MAGISTER PROGRAM (S2) LEGAL PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITY ISLAM SULTAN AGUNG.

Examining the effectiveness of law enforcement basically compares the reality of law with the ideal of law. The perpetrators of the criminal act of making oplosan/ fake fertilizer have been decided by the court to violate the Law of RI. No. 3 Year 2014 on Industry Article 120 paragraph (1) and subsider Article 62 Paragraph (1) jo Article 8 letter a Law No.8 Year 1999 on Consumer Protection and Article 60 paragraph (1) letter f of Law. R.I NO. 12 of 1992 on Plant Cultivation System. Verdict of Jepara District Court NUMBER: 05/Pid.Sus/2015/PN. Jpa has dropped a prison sentence and fine to the perpetrator. Problems in case study of oplosan/ fake fertilizer by CV. Indo Agritama Jepara industry is how criminal law enforcement as well as how inhibiting factors of criminal law enforcement. Based on the results of sociological juridical research can be concluded as follows: the enforcement of criminal law against perpetrators of the crime is done by: (1). Formulation Stage, law enforcement is regulated in RI Law. No.3 Year 2014, Law No.8 Year 1999, Law. R.I NO. 12 of 1992 (2). Application phase, criminal law enforcement stages by law enforcement officers ranging from police, prosecutors, to courts; (3). Execution phase, the defendant was sentenced to imprisonment for 1 (one) year and fined Rp.8.000.000,- (eight million Rupiah). The inhibiting factors of criminal law enforcement are (1). The legal factor itself; (2). Law enforcement factors. Suggestions in this study, Law enforcers ie judges, prosecutors and police should perform their respective roles well and improve performance in law enforcement efforts against fraudulent proliferation of prohibited fertilizers/ prohibited in order to implement effective law enforcement.

Keywords: Criminal Law Enforcement, Effectiveness of Law Enforcement, False Fertilizer, Inhibiting Factors of Criminal Law Enforcement, Legal Factors of Law Enforcement.